

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), *Leverage* (X3), Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah tetapi ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *Leverage* sebagai variabel independen, dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

- b. Kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel jenuh
 - b. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pengambilan sampelnya.
 - c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki perbedaan pada variabel independennya. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage*, tetapi penelitian sekarang menggunakan belanja daerah, dana perimbangan dan *Leverage*.
2. Ria Novia dan Kartim (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Size* (X1), *Wealth* (X2), *Leverage* (X3), *Intergovernmental Revenue* (X4) terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). Sampel yang digunakan adalah duabelas Kabupaten/Kota terbesar di Papua dengan menggunakan teknik analisis *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Novia dan Kartim (2019) adalah bahwa variabel *size*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah tetapi variabel *wealth* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan pemerintah pada variabel dependennya
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yaitu sama sama menggunakan penelitian kuantitatif
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama sama menggunakan data sekunder.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode *purposive sampling*, tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel jenuh.
 - b. Penelitian terdahulu menggunakan sumber data laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tetapi penelitian sekarang menggunakan sumber data laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Putri Puspita Ayu (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). sampel yang digunakan adalah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Puspita Ayu (2018) adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan untuk peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama sama menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama sama menggunakan analisis linier berganda

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu memilih Provinsi Jawa Barat dalam penelitiannya, tetapi peneliti sekarang menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai penelitiannya.
- b. Peneliti sekarang menambahkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan *Leverage* dalam variabel independennya.

4. Tatas Ridho Nugroho (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *size* (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), Belanja daerah (X3), dan kinerja keuangan (Y). Sampel yang digunakan adalah tiga puluh daerah di Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Hasil penelitian yang dilakukan Tatas Ridho Nugroho (2018) adalah *size* dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah tetapi *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Kesamaan dalam pengambilan data antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai sampel penelitiannya.
- c. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Peneliti sekarang menambahkan pendapatan asli daerah dan *Leverage* sebagai variabel independennya.

5. Aulia Rizka Kusuma (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah yang di proksikan dengan ukuran Pemerintah Daerah (X_1), Kemakmuran (X_2), Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X_3), *Leverage* (X_4), dan belanja daerah (X_5) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rizka Kusuma (2017) adalah ukuran Pemerintah Daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah,

tetapi kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, tetapi belanja daerah sebagai variabel independen
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teori agensi dalam penelitiannya.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan *purposive sampling* dalam metode pengambilan sampelnya, tetapi peneliti sekarang menggunakan sampel jenuh dalam pengambilan sampelnya.
 - b. Pada penelitian sekarang menambahkan teori legitimasi dalam penelitiannya
6. Nyanyu Miftahul Ilmiyyah, Evada Dewata Sari dan Sarikadarwati (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2015. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah opini audit (X1), Ukuran legislatif (X2), *Intergovernmental Revenue* (X3), *size* (X4), *Leverage* (X5) dan klaster kemampuan keuangan daerah (X6) dan kinerja keuangan pemerintah (Y). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyanyu Miftahul Ilmiyah, Evada dan sarikadarwati (2017) adalah variabel opini audit, ukuran legislatif, *size*, *Leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, tetapi variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah *purposive sampling*, tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel jenuh
- b. Peneliti terdahulu menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tetapi peneliti sekarang menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

7. Ida Bagus Badjra (2017)

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan dana perimbangan (X2) terhadap belanja modal (Y1) dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y2). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan metode sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil

penelitian ini yang dilakukan oleh Ida Bagus Badjra (2017) adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dana perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, PAD tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali serta dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan PLS dalam pengujian hipotesis, tetapi penelitian sekarang menggunakan SPSS 23
 - b. Peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif tetapi penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif.
8. Rina Purwanti dan Sumaryanto (2017)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah (X1), Retribusi daerah (X2), dan dana perimbangan (X3) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y). sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di pulau jawa dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina dan Sumaryanto (2017) adalah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, tetapi dana perimbangan sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel jenuh
 - b. Penelitian sekarang menambahkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah
9. Sri Mulyani (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh belanja modal (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), ukuran Pemerintah Daerah (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan metode sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2017) adalah variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, tetapi variabel *intergovernmental Revenue*, ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan dalam peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antar peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan metode sensus dalam pengambilan sampel, tetapi peneliti sekarang menggunakan sampel jenuh
- b. Peneliti terdahulu menggunakan teori kontingensi, tetapi penelitian sekarang menggunakan teori legitimasi

10. Hendro Sumarjo (2010)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Size* (X1), *Wealth* (X2), ukuran legislatif (X3), *Leverage* (X4) dan *intergovernmental*

Revenue (X) serta kinerja keuangan pemerintah (Y). sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Teknik analisis data menggunakan Analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendro Sumarjo (2010) adalah *size*, *Leverage*, *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, tetapi kemakmuran dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan teknik *judgemnr-sampling* dalam pengambilan sampelnya, tetapi penelitian sekarang menggunakan sampel jenuh dalam pengambilan sampelnya.

Berikut tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Independen			<i>Leverage</i>
		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Dana Perimbangan	
1	Dwi Saraswati (2019)	B	-	-	TB
2	Rina Novia (2019)	-	-	TB	TB
3	Putri Puspita Ayu (2018)	B	-	TB	-
4	Tatas Ridho Nugroho (2018)	-	TB	B	-
5	Aulia Rizka Kusuma (2017)	-	B	-	TB
6	Nyanyul Miftahul (2017)	-	-	B	TB
7	Ida Bagus Badjra (2017)	TB	-	B	-
8	Rina Purwanti dan Sumaryanto (2017)	-	-	B	-
9	Sri Mulyani (2017)	B	-	B	-
10	Hendro Sumarjo (2010)	-	-	-	B

Sumber: Data yang diolah, 2020

Keterangan :

B = Berpengaruh

TB = Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang terdapat hubungan antara dua pihak yaitu pihak *principal* dan pihak agen yang timbul karena adanya suatu perjanjian

atau kesepakatan diawal. Pihak yang memberikan wewenang atau tugas biasanya disebut dengan *principal*, tetapi pihak yang menerima dan mengerjakan wewenang atau tugas disebut dengan agen(Kusuma, 2017). Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Pemerintahan pusat memberikan tugas atau wewenang yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah juga melaksanakan tugas serta wewenang kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Masyarakat sebagai *principal* memiliki hak untuk dapat menilai dan mengevaluasi hasil kinerja Pemerintah Daerah selama periode berjalan. Hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk memperbaiki dalam periode selanjutnya, evaluasi tersebut dapat berupa evaluasi terhadap APBD, APD, dan lain sebagainya. Anggaran Pemerintah Daerah/ Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah (*agent*) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Apabila Pemerintah Daerah (*agent*) kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat maka terjadilah konflik diantara kedua belah pihak tersebut. Konflik juga bisa terjadi apabila Pemerintah Daerah tidak bertindak dan tidak memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempublikasikan hasil kinerja keuangan secara transparan agar masyarakat mengerti tentang pendapatan

serta pengeluaran anggaran keuangannya sendiri guna untuk memajukan Pemerintah Daerah ini.

Maka dari itu teori keagenan perlu untuk diawasi dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU yang berlaku dan tidak ada kesalahpahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Permendagri No. 13 tahun 2004 menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah hasil dari program ataupun kegiatan yang telah tercapai sesuai dengan keinginannya. Kinerja dapat diukur apabila suatu individu atau organisasi telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu atas keberhasilannya tersebut.

Analisis keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap instansi maupun organisasi untuk dapat melihat perkembangan perusahaannya. Dengan adanya analisis kinerja keuangan dapat melihat dan menilai kinerja masa lalu dengan berbagai analisis sehingga mendapatkan hasil laporan posisi keuangan yang menggambarkan realitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Terdapat 5 rasio dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan suatu gambaran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan menggunakan keuangannya sendiri tanpa bantuan pihak eksternal.

2. Ratio Efektivitas

Ratio Efektivitas merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan potensi riil daerah.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan gambaran besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima.

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah berfokus pada alokasi dananya terhadap belanja rutin dan belanja pembangunannya.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk mengetahui apakah setiap tahun pemerintah daerah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif dalam tahun anggaran yang bersangkutan selama periode anggaran.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang berbeda beda guna untuk menghasilkan pendapatan untuk dapat menjalankan roda perekonomiannya. Menurut UU No 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dengan berlakunya sistem desentralisasi diwajibkan Pemerintah Daerah mampu untuk memperoleh pendapatan dengan cara mengelola sumber sumber keuangan yang ada di daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tentang tingkat kemandirian suatu Pemerintah Daerah dalam mengelola serta mengurus sendiri sistem pemerintahannya. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah membuktikan bahwa daerah tersebut mampu untuk melaksanakan sistem desentralisasi dengan baik, serta dapat memperkecil tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Sebaliknya, apabila semakin kecil penerimaan pendapatan asli daerah maka daerah tersebut belum mampu melaksanakan sistem desentralisasi sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sangatlah diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari seluruh kekayaan yang terdapat di daerahnya tersebut. Misalnya, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan yang sah. Diharapkan dengan sumber-sumber kekayaan daerah yang ada, pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak eksternal.

2.2.4 Belanja Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan hasil kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam periode yang dianggarkan. Belanja daerah memiliki 2 macam jenis, antara lain:

1. Belanja daerah secara langsung

Belanja daerah secara langsung merupakan belanja daerah yang telah direncanakan sebelumnya untuk keperluan aktivitas atau kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program serta kegiatan Pemerintah Daerahnya sendiri. Contoh dari belanja daerah langsung adalah belanja pegawai, belanja barang atau jasa dan belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang telah direncanakan sebelumnya tapi tidak memiliki hubungan secara langsung dalam melaksanakan tugas maupun program pemerintah. Contoh dari belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.2.5 Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk dapat membantu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Setiap periode Pemerintah Pusat memberikan pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan nama lain dari dana perimbangan yang bertujuan sebagai pemerataan disetiap daerahnya sendiri. Terdapat beberapa jenis dana perimbangan, antara lain:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah yang dapat membantu untuk mendanai semua kebutuhan daerah.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum juga dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi di setiap daerah serta dapat memenuhi kebutuhan daerah otonom sehingga sistem desentralisasi tetap berjalan

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus biasanya dapat disebut dengan DAK. DAK merupakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang ada di dalam Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas nasional.

2.2.6 *Leverage*

Leverage menggambarkan perbandingan antara total asset dengan total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Apabila sumber pendapatan asli daerah rendah, tetapi kebutuhan Pemerintah Daerah belum terpenuhi sehingga mengalami kekurangan dana. Maka pemerintah harus meminjam dana kepada pihak eksternal untuk dapat membantu menutupi semua kekurangan dana yang ada di Pemerintah Daerah. Dengan begitu Pemerintah Daerah belum bisa

mengelola dan mengurus sendiri kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan modal sendiri.

2.3 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen.

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

UU No 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerahnya sendiri dengan cara mengelola sumber daya serta kekayaan lainnya yang ada di daerahnya sendiri, tetapi jika Pemerintah Daerah memiliki pendapatan yang besar tetapi kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka Pemerintah Daerah wajib untuk mengkaji ulang serta memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi dimasa lalu agar kesalahan tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Menurut (Rioni & Saraswati, 2019) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil ini serupa dengan (Ayu, 2018) juga berpendapat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hubungan antar variabel yaitu jika semakin tinggi pendapatan daerah setiap periode berjalan maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berhasil karena Pemerintah daerah mampu memaksimalkan pajak dan retribusi daerahnya dari yang dianggarkan, dan sebaliknya jika terlalu rendah pendapatan pemerintah daerah maka Pemerintah daerah masih harus mengevaluasi serta mengkaji ulang terkait dengan kinerja keuangan mereka dari segi pendapatan daerah. Sesuai denganteori

keagenan (*Agency Theory*), pemerintah daerah sebagai agen diberikan wewenang atau tugas dari masyarakat (Principal) untuk mengurus serta mengelola seluruh anggaran pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah ataupun sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri yang berguna untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai contoh pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, atau fasilitas umum lainnya sehingga masyarakat semakin sejahtera.

2.3.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang diakui sebagai pengurang nilai dari hasil kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dalam periode yang dianggarkan. Apabila tingkat belanja daerahnya tinggi maka pelayanan yang diperuntukan oleh masyarakat semakin baik. Apabila tingkat belanja daerahnya rendah maka pelayanan yang diperuntukkan masyarakat semakin memburuk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hubungan antar variabel yaitu jika variabel belanja daerah semakin rendah tiap tahunnya maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan berhasil karena Pemerintah daerah mampu memaksimalkan anggaran belanja daerah dan tidak melebihi batas yang dianggarkan sebelumnya, dan sebaliknya jika terlalu tinggi dari anggaran maka Pemerintah daerah dianggap tidak efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan

tidak langsung. Sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) Pemerintah daerah (*Agent*) dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebutuhan masyarakat serta harus dapat meningkatkan pelayanan masyarakat (*Principal*) dalam rangka pembelanjaan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bertujuan agar masyarakat (*Principal*) hidup lebih sejahtera dan merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah (*Agent*)

2.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah serta pemerataan keuangan masing masing daerah. Dana perimbangan juga disebut dengan pendapatan transfer yang dikirim oleh Pemerintah Pusat dalam periode anggaran. (Mulyani & Wibowo, 2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil yang sama yang dilakukan oleh (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hubungan antar variabel yaitu jika realisasi belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalami defisit dan kinerja keuangannya dianggap tidak berhasil dalam memanfaatkan dana perimbangan, tetapi jika dalam dana perimbangan tersebut Pemda mampu memaksimalkan realisasi belanja daerah tanpa defisit hal tersebut mampu dikatakan bahwa Pemerintah daerah berhasil dalam kinerja keuangan

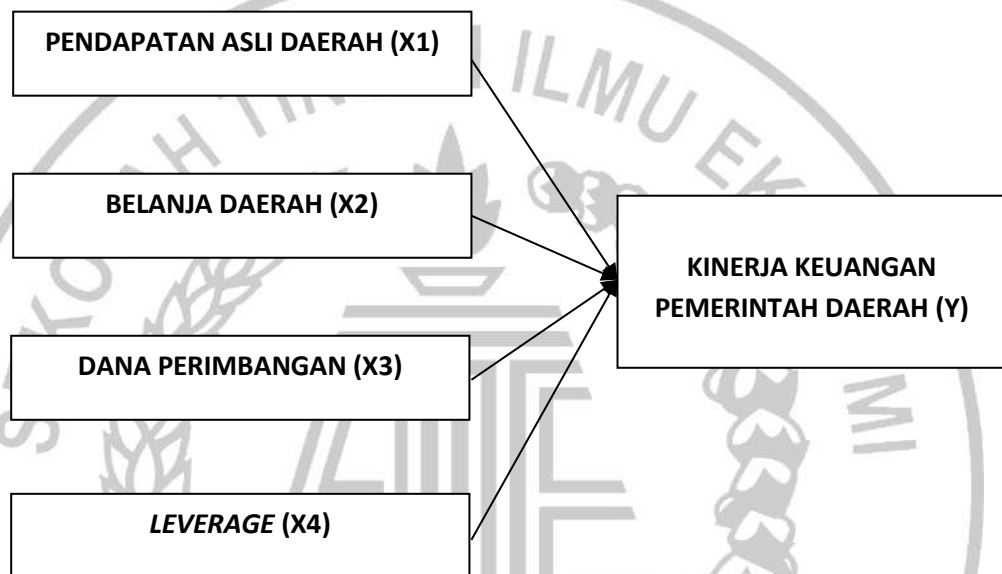
mereka terhadap dana perimbangan. Sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*), Pemerintah daerah (*Agent*) harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat artinya, Pemerintah daerah harus mampu untuk dapat mengelola dana transfer atau dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat selaku pihak prinsipal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.3.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan hasil perbandingan antara total aset dan total liabilitas pada Pemerintah Daerah. Apabila tingkat *Leverage* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah rendah maka kinerja keuangannya dapat dikatakan baik. Apabila tingkat *Leverage* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tinggi maka kinerja keuangan pemerintah dikatakan buruk. Sehingga Pemerintah Daerah harus untuk mengkaji serta mengevaluasi ulang agar utang terhadap pihak eksternal tidak semakin melonjak tinggi (Ilmiyyah, Dewata, & sarikadarwati, 2017). Menurut (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hubungan antar variabel yaitu jika total aset lebih besar daripada total liabilitas maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah mampu memanfaatkan asetnya dalam memperoleh pendapatan daerah, tetapi jika total liabilitas yang tinggi maka Pemerintah daerah dinyatakan belum berhasil memaksimalkan total aset dalam periode tersebut untuk memperoleh pendapatan daerah dan hanya mampu mengandalkan kewajiban atau liabilitasnya terhadap pihak eksternal. Sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*), Pemerintah daerah mengalami kesulitan dana untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah membutuhkan suntikan dana untuk dapat

memenuhi kebutuhan pemerintah dengan cara meminjam atau berhutang kepada pihak eksternal agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran didapatkan hasil hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Belanja Daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H4 : *Leverage* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

